

IJTIMAIYAH

(Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya)

Email: jurnalijtimaiyah45@gmail.com.

<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ijtimaiyah/issue/archive>

KORUPSI MEMPENGARUHI EKONOMI DI INDONESIA

Ahmad Khairuddin¹, Arthyka Susila Yudhayani², Afriani Harahap³,
Vivi Wulandari⁴

¹STAI Al-Islahiyah Binjai

²³⁴ UIN Sumatera Utara Medan

¹ahmadkhairuddin@gmail.com, ²artikasusila@gmail.com,
³afrianihrp@gmail.com, ⁴viviwulandari@gmail.com.

Abstrak

Korupsi merupakan suatu tindakan menyimpang untuk mendapatkan kekayaan dan keuntungan pribadi menggunakan uang rakyat atau negara secara ilegal dengan menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan di Indonesia. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. perubahan pada sebagian besar aspek kehidupan. Hal tersebut tentu membawa dampak baik sekaligus buruk yang harus dihadapi masyarakat. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis penataan korupsi korupsi yang berada di Indonesia yang menjadikan bangsa dan Negara kita menjadi hancur perekonomian pada masyarakat. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi – yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan – tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa –sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan– diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi mempengaruhi ekonomi di Indonesia

Abstract

Corruption is a deviant act to gain wealth and personal gain using people's or state money illegally by abusing the power given in Indonesia. Corruption that occurs in Indonesia is very worrying and has an extraordinary negative impact on almost all aspects of life. Corruption has destroyed the economic system, democratic system, political system, legal system, government system, and social order in this country. On the other hand, efforts to eradicate corruption that have been carried out so far have not shown optimal results. Corruption at various levels still occurs as if it has become a part of our lives which is even considered as normal. If we let this condition continue, sooner or later corruption will destroy this country. change in most aspects of life. This certainly has both good and bad impacts that must be faced by society. The purpose of this

writing is to analyze the management of corruption in Indonesia which has destroyed our nation and country's economy in society. Corruption must be seen as an extraordinary crime which therefore requires extraordinary efforts to eradicate it. Efforts to eradicate corruption – which consists of two major parts, namely (1) enforcement and (2) prevention – will never succeed optimally if it is only carried out by the government without involving the community's participation. Therefore it is not excessive if students – as an important part of society who are future heirs – are expected to be actively involved in efforts to eradicate corruption in Indonesia.

Keyword: *Corruption affects the economy in Indonesia*

PENDAHULUAN

Membicarakan sejarah adalah membicarakan pengulangan masa lalu, termasuk korupsi di Indonesia dan dinamika yang melingkupinya. Peter Carey, dalam buku ini, mengawali ulasan korupsinya dengan mengangkat pengalaman koruptif Patih Danurejo IV, yang kalap karena melimpahnya arus uang di Jawa dari penyewa tanah Eropa tahun 1816. Carey melihat masa itu sama dengan Orde Baru, ketika terjadi lonjakan harga minyak oleh OPEC tahun 1973, dimana korupsi malah melembaga. Carey kemudian menghadirkan beberapa perbandingan untuk menegaskan keterulangan sejarah, termasuk model penanganan Diponegoro terhadap Danurejo dengan model penanganan Ahok terhadap pejabat korup DKI (hlm. xix-xxi). Demikian pula model penanganan korupsi zaman Soekarno melalui aturan pelaporan harta, zaman Soeharto melalui operasi tertib, zaman Habibie melalui UU No. 28 Th. 1999, dan zaman Jokowi dengan Saber Pungli. Bahkan, ia mengingatkan muara dari korupsi di masa lalu, seperti Perang Jawa dan bubarnya VOC.

Memang, di bagian awal ini, Carey ingin memberi warning. Bahwa meski Indonesia bisa survive sampai sekarang, hanya masalah waktu saja Indonesia akan kandas jika masalah korupsi tidak diatasi secara reformatif. Sebab, demikian pula yang terjadi pada Inggris sepanjang abad 17 sampai 18, dan Prancis Lama (ancien regime) menjelang revolusi. Hanya saja, Carey menyatakannya secara implisit dan hampir tidak kentara. Pemerintahan dan setiap urusan yang dijalankan di dalamnya merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan suatu negara. Segala urusan tersebut tentunya tidak berjalan otomatis tetapi dikerjakan oleh sumber daya manusia, yang lebih dikenal dengan aparatur pemerintahan. Hal ini membuat setiap aparatur memiliki peran krusial bagi negaranya. Aparatur pemerintahan diberi mandat serta tanggung jawab oleh negara dan rakyat untuk mengatur urusan pemerintahan yang telah menjadi tugas dan fungsinya masing-masing. Sudah merupakan sebuah keharusan bagi setiap aparatur pemerintahan untuk bisa menjalankan semua kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka dengan baik dan penuh integritas.

Menjadi suatu masalah yang fatal apabila para aparatur pemerintahan atau birokrat menunjukkan perilaku yang menyimpang dari ketentuan tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan karena akan menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan (Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi social/penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Bentuk perampasan dan pengurasan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan

rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak korupsi, khususnya dalam bidang perkembangan ekonomi dan penegakan hukum.

METODE

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang di dapatkan dari sumber sumber seperti dalam buku dan journal. Metode ini juga menggunakan Penggunaan Metode deksriptif dengan maksud untuk menjelaskan, menguraikan atau mendeskripsikan korupsi aparatur pemerintahan Indonesia dan perilaku korupsi penyalagunaan bantuan untuk masyarakat, Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah pengumpulan melalui data yang diperoleh dari sebuah referensi referensi yang berkaitan dengan korupsi yang ada di Negara kuta Indonesia dan laporan-laporan, artikel ilmiah dan dokumentasi serta data lain yang relevan dengan perilaku korupsi dalam penyaluran perekonomian dan bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat Indonesia Kajian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji seluruh bahan bacaan atau kepustakaan terkait perilaku korupsi, dana bantuan social, penyalagunaan bantuan social a yang dibaca dan dianalisis oleh penulis atau dengan kata lain objek penelitian pada tulisan ini diperdalam atau diteliti lewat setiap informasi yang ditemukan dalam kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN KORUPSI MEMPENGARUHI EKONOMI DI INDONESIA

Dampak

Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi adalah menimbulkan lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktifitas, rendahnya kualitas barang dan jasa, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. Adapun dampak korupsi dalam penegakan hukum adalah menimbulkan pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga Negara Korupsi. Memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (an enermous destruction effects) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat (Arief, 2015) Pada sektor ekonomi, korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dimana pada sektor privat, korupsi meningkatkan biaya karena adanya pembayaran ilegal dan resiko pembatalan perjanjian atau karena adanya penyidika (Hariyani & Priyarsono, Dominicus Savio, Asmara, 2016).

Namun, ada juga yang menyebutkan bahwa korupsi mengurangi biaya karena mempermudah birokrasi yaitu adanya sogokan yang menyebabkan pejabat dapat membuat aturan baru dan hambatan baru. Dengan demikian, korupsi juga bisa mengacaukan perdagangan. Perusahaan yang berada pada lingkup pemerintahan akan terlindungi dari persaingan, hal tersebut menyebabkan perusahaan menjadi tidak efisien. Berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela dan berikut ini adalah hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi adalah

Sebagai berikut: yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri (PMDN) dan asing (PMA) yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan negara menjadi sulit sekali terlaksana, karena permasalahan kepercayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi selain masalah stabilitas (Makhfudz, 2016) Kondisi negara yang korup akan membuat pengusaha multinasional meninggalkannya, karena investasi di negara yang korup akan merugikan dirinya karena memiliki 'biaya.

Penyebab Korupsi

Korupsi terjadi karena banyaknya faktor penyebab. Berikut adalah faktor-faktor penyebab korupsi: pertama, penegakan hukum tidak konsisten: penegakan hukum hanya sebagai make-up politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan/wewenang, takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan. Ketiga, langkanya lingkungan yang antikorup: sistem dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas. Keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kelima, kemiskinan, keserakahan: masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Keenam, budaya memberi upeti, imbalan jasa, dan hadiah. Ketujuh, konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi: saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya. Kedelapan, budaya permisif/serba membolehkan; tidak mau tahu: menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi. Kesembilan, gagalnya pendidikan agama dan etika: ada benarnya pendapat Franz Magnis Suseno bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya berkuat pada masalah bagaimana cara beribadah saja.

Penanganan Kasus Korupsi Aparatur Pemerintahan Indonesia

Korupsi oleh para aparatur pemerintahan merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pegawai atau pejabat pemerintah yang mengutamakan kepentingan dan kepuasan pribadi demi mendapat kekayaan dengan cara mengambil uang atau aset negara milik rakyat dan digunakan untuk memenuhi keinginan pribadinya. Korupsi menjadi salah satu masalah terbesar dalam negara ini. Korupsi telah menjadi momok bagi seluruh masyarakat Indonesia karena membawa kerugian yang sangat besar dan berdampak bagi begitu banyak pihak. Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi telah menjadi penyakit yang cukup sulit diberantas

atau dihilangkan dari negara Indonesia. Banyak dari aparaturnya pemerintahan Indonesia yang masih belum memiliki karakter berbangsa yang benar sehingga perilaku korupsi ini pun terus terjadi. Integritas menjadi nilai terpenting bagi kehidupan pemerintahan, namun bangsa ini juga cukup memiliki krisis terhadap nilai integritas tersebut. Menurut informan dari Penyuluh Antikorupsi, Dr. Maisondra bahwa “Nilai-nilai integritas yang dimaksud ialah 9+1 nilai integritas yang dicetus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, rajin, sederhana, berani, serta sabar. Namun sayangnya, hanya sedikit orang yang dapat memahami benar serta benar serta mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan berbangsa, terutama dalam pemerintahan.”

KESIMPULAN

Korupsi merupakan suatu tindakan menyimpang untuk mendapatkan kekayaan dan keuntungan pribadi menggunakan uang rakyat atau negara secara ilegal dengan menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan di Indonesia (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Bentuk perampasan dan pengurasan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak korupsi, khususnya dalam bidang perkembangan ekonomi dan penegakan hukum. Korupsi terjadi karena banyaknya faktor penyebab. Berikut adalah faktor-faktor penyebab korupsi: pertama, penegakan hukum tidak konsisten: penegakan hukum hanya sebagai make-up politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan/wewenang, takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan. Ketiga, langkanya lingkungan yang antikorup: sistem dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas. Keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriana Issa Sofia, Agus Mulya Karsona, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Amalia Fadhila Rachmawati, Eksaminasi: Jurnal Hukum, *Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum*, Vol, 1 No. 1, 2021, pp 12-19
- Peter Carey, Suhardiyoto Haryadi, & Sri Margana, 2017, *Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia: dari Daendels (1808-1811) sampai Era Reformasi*, Komunitas Bambu
- Septiana Dwiputrianti, *MEMAHAMI STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DI*

INDONESI, STIA LAN Bandung, Jl. Cimandiri 34-38 Bandung 40115 E-mail:
septiana_dwi@yahoo.com.